



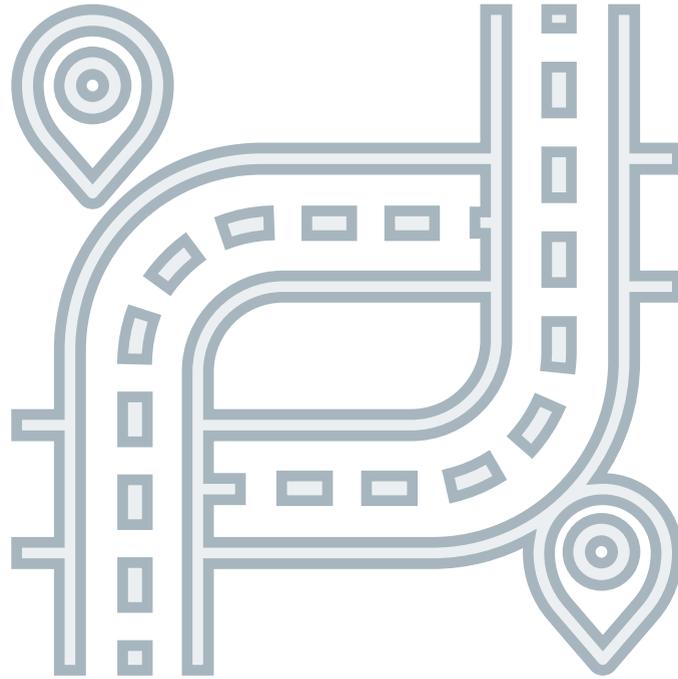
RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

2020-2024

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

DAFTAR ISI	2
BAB 1 5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN	4
• Pembangunan Infrastruktur	
• Pembangunan SDM	
• Mendorong Investasi	
• Reformasi Birokrasi	
• Penggunaan APBN	
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN	14
• Target Pembangunan Nasional	
• Target Pembangunan Wilayah	
BAB 3 PENGEMBANGAN WILAYAH	20
• Ibu Kota Negara (IKN)	
• Pengembangan Kawasan Prioritas	
• Transformasi Struktural (Pariwisata, Industri, Pertanian, dan Industri Kreatif)	
• Infrastruktur Ekonomi	
• Investasi dan Reformasi Birokrasi	
• Pengembangan Pelayanan Dasar	
• Development Constraint	
BAB 4 PRASYARAT PEMBANGUNAN	34
BAB 5 KERANGKA PENDANAAN DAN REGULASI	36
BAB 6 MAJOR PROJECT	44



1

5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN

- **Pembangunan Infrastruktur**
- **Pembangunan SDM**
- **Mendorong Investasi**
- **Reformasi Birokrasi**
- **Penggunaan APBN**



5

Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan

2 | Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan *stunting*-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

3 | Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya

4 | Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga

5 | Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

VISI 1 PRESIDEN:



“Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan..”

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN TOL LAUT, JEMBATAN UDARA, DAN JALAN TRANS PAPUA

Mendukung lumbung pangan nasional dan sentra industri kecil dan food estate di Merauke

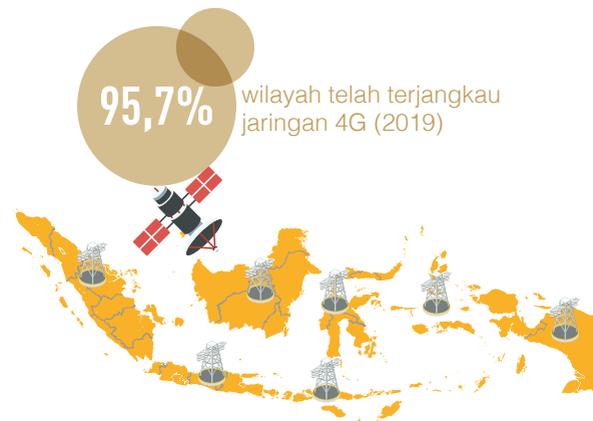


PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MERAUKE

(Inpres 9/2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat)

PALAPA RING

Tergelarnya Palapa Ring mendukung pemanfaatan teknologi digital di Industri Kecil dan Menengah (IKM) menuju IKM Go-Digital



KONEKTIVITAS Mendukung Pariwisata

Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Bandara Sam Ratulangi, dan jalan akses bandara mendukung Pariwisata Likupang



INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pembangunan waduk dan air baku di wilayah timur mendukung pengembangan KEK Sorong dan irigasi untuk perkebunan, persawahan, perikanan, dan tambak



196,85
Juta m³

wilayah telah terjangkau Volume Total Bendungan

VISI 2 PRESIDEN:

“Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi Stunting, Kematian Ibu, Kematian Bayi...”

ARAH KEBIJAKAN – PEMBANGUNAN KESEHATAN SDM



PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan.
2. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap.
3. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil.
4. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi



- Penurunan kematian ibu dan bayi
- Peningkatan kesehatan reproduksi



PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi



- Penurunan stunting
- Konseling pengasuhan
- Akses air minum dan sanitasi layak

Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Penurunan Stunting Terintegrasi



PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan



- Imunisasi
- Obat dan perbekalan kesehatan
- Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan

ARAH KEBIJAKAN – PEMBANGUNAN KESEHATAN SDM

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi

- Sistem insentif/regulasi untuk industri
- Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja

- Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri;
- dual TVET, teaching factory dan pemagangan;
- Penguatan softskills dan pembelajaran bahasa asing;
- kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren;
- pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri

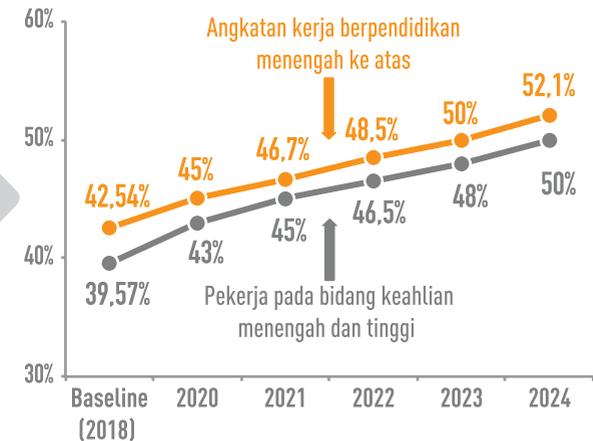
- Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru
- Peningkatan akreditasi
- Skema pendanaan peningkatan keahlian
- Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry
- Pembentukan Komite TVET

- Standar kompetensi berdasarkan okupasi yang mengacu standar internasional, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor
- Penguatan lembaga sertifikasi profesi

TAHUN 2024:

2,8 Juta lulusan pelatihan vokasi

2 Juta lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)



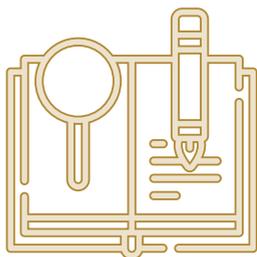
VISI 3 PRESIDEN:

“ Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...” ”



KEPASTIAN HUKUM BERUSAHA DAN INVESTASI

- **Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional**
K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI, PTSP Kota Surabaya
- **Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/ kementerian lembaga dan daerah**
K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah, Kemendagri



FASILITASI KEMUDAHAN USAHA DAN INVESTASI

- **Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan DNI**
K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait yang sektornya masuk dalam DNI
- **Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi**
K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PTSP daerah, Kemendagri
- **Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance**
K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, K/L terkait perizinan investasi
- **Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan**
K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri

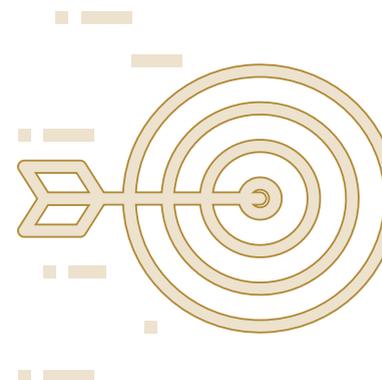


TARGET 2024

Peningkatan investasi **7,3-8 persen** karena naiknya tingkat kepastian hukum dan kemudahan usaha yang ditandai dengan:

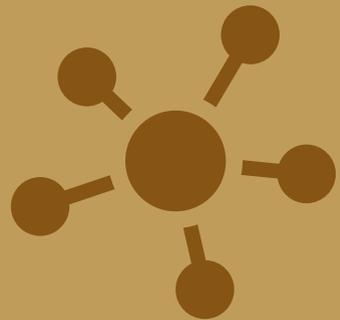
Meningkatnya peringkat **EoDB** Indonesia untuk aspek penegakkan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit

* Kondisi saat ini peringkat 146 dari 190 negara



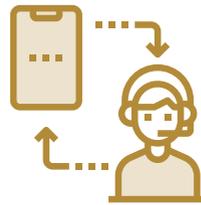
VISI 4 PRESIDEN:

“Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin Simple, Semakin Lincah, Mengubah Mindset,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...”



1. Penyederhaan perijinan
2. Penataan struktur kelembagaan birokrasi

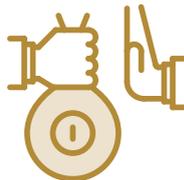
ARAH KEBIJAKAN



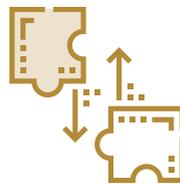
Penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perijinan



Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perijinan



Pembangunan zona Integritas pada unit pelayanan perijinan



Penataan koordinasi K/L yang menangani perijinan sektoral

TARGET 2024

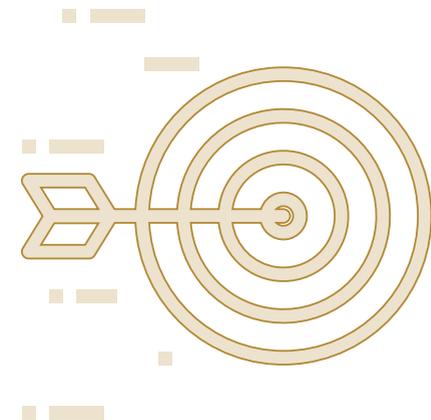
Terwujudnya **ASN Profesional, berintegritas, dan Netral** yang ditandai dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas

- K/L: **85%**
- Provinsi: **85%**
- Kabupaten/kota: **75%**

Terwujudnya **Kelembagaan yang Efektif dan Berbasis Prioritas Pembangunan** yang ditandai dengan Indeks Maturitas SPBE Kategori Baik

- K/L: **100%**
- Provinsi: **80%**
- Kabupaten/kota: **50%**

Terwujudnya **Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif** yang ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) rata-rata **3,75**



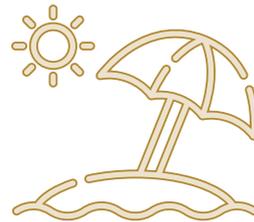
VISI 5 PRESIDEN:



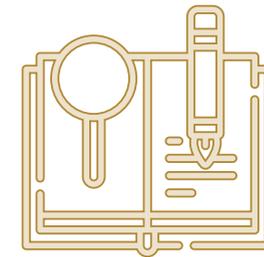
Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat...



Rencana pembangunan RPJMN 2020-2024 selanjutnya menjadi fokus penyusunan program pembangunan di RKP dan APBN antara lain:



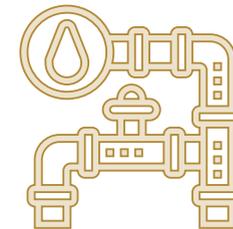
Penyelesaian **Kawasan Pariwisata** (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi)



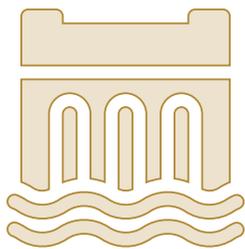
Pelatihan dan **Pendidikan Vokasi**



Pembangunan **Tol Trans Sumatera**



Pembangunan **10 juta** sambungan air minum ke rumah



Pembangunan **waduk multiguna**

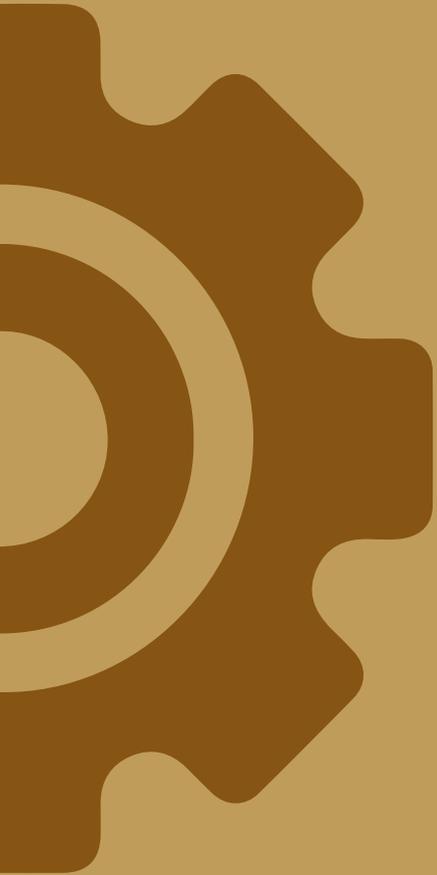


Percepatan Penurunan Kematian **Ibu Hamil dan Stunting**



Penguatan **mitigasi bencana**

Kelima prioritas presiden yang terdiri dari **infrastruktur, SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan APBN** diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024



1 | Pembangunan Infrastruktur

2 | Pembangunan SDM

3 | Mendorong Investasi

4 | Reformasi Birokrasi

5 | Penggunaan APBN

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



**Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas**



Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.



**Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan**



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.



**Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing**



Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.



**Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan**



Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan



**Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar**



Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.



**Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim**



Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.



**Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik**



Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

2

EKONOMI MAKRO

- Target Pembangunan Nasional
- Target Pembangunan Wilayah

GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024

Sasaran pertumbuhan ekonomi di sisi produksi, yaitu transformasi struktural untuk mencapai terjadinya peningkatan kesejahteraan. Sedangkan di sisi pengeluaran, sasaran utama pemerintah adalah untuk memperkuat permintaan domestik.

PDB SISI PRODUKSI

01	Industri 5,3 - 7,0	
02	Pertanian 3,8 - 3,9	
03	Pertambangan 1,7 - 1,9	
04	Listrik 4,4 - 4,8	
05	Konstruksi 5,8 - 6,2	
06	Transportasi 7,2 - 7,3	
07	Infokom 7,4 - 8,2	
08	Jasa Keuangan 6,3 - 7,2	
09	Perdagangan 5,5 - 6,2	

RATA-RATA 2020-2024 SKENARIO RENDAH DAN TINGGI (PERSEN/TAHUN)



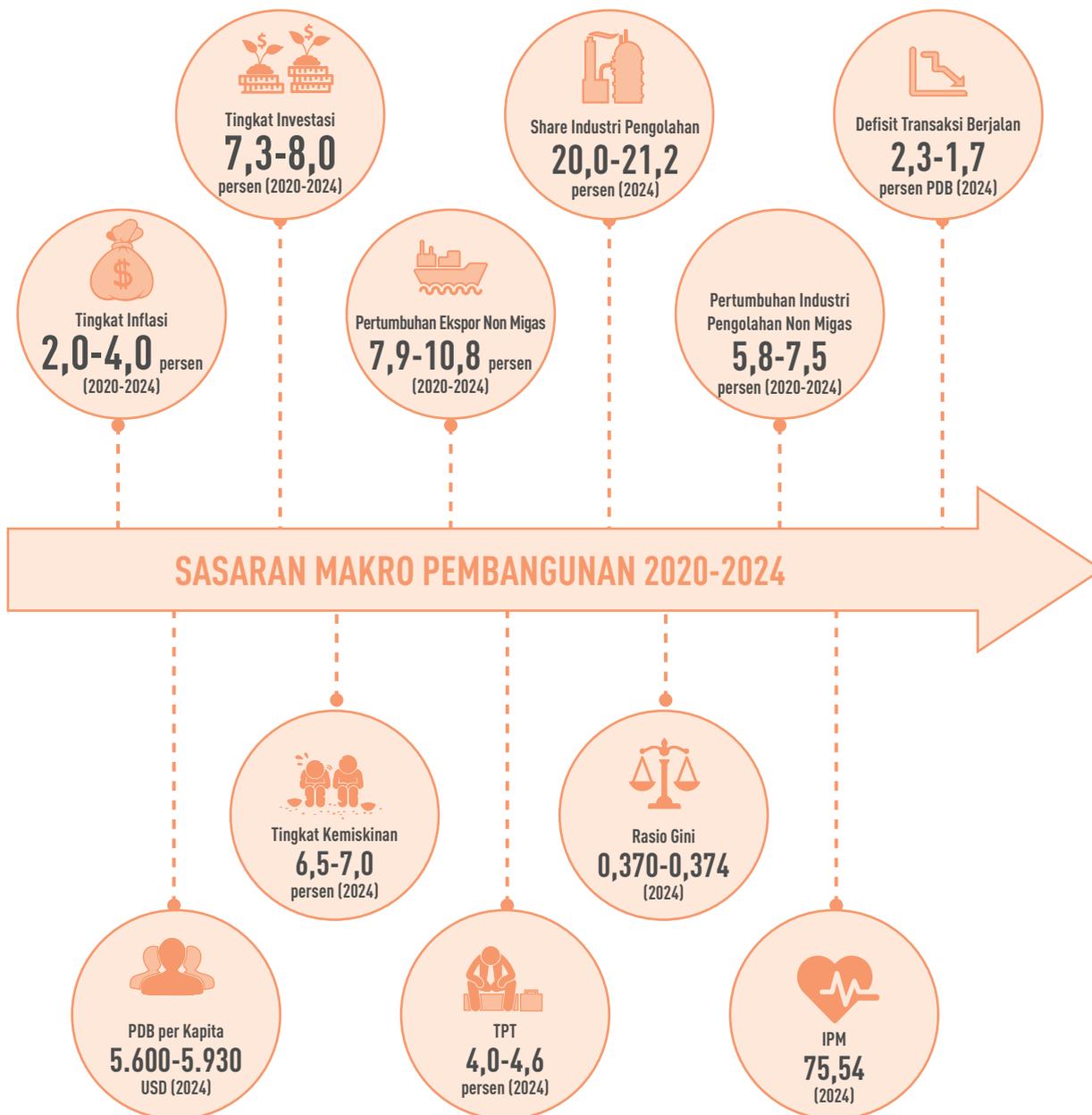
*Perhitungan Bappenas
(sangat sementara)*

PDB SISI PENGELUARAN

	Konsumsi RT & LNPRT 1,7 - 1,9	01
	Konsumsi Pemerintah 4,4 - 4,8	02
	Investasi 5,8 - 6,2	03
	Ekspor 7,2 - 7,3	04
	Impor 7,4 - 8,2	05

SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020-2024

- Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0% per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,0-5,0%.
- Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0%.
- Tingkat kemiskinan dan TPT pun diharapkan turun menjadi 6,5-7,0% dan 4,0-4,6% pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.



SASARAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN

PENINGKATAN PEMERATAAN ANTAR WILAYAH (ANTARA KBI-KTI DAN JAWA DAN LUAR JAWA).



1

PENINGKATAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.



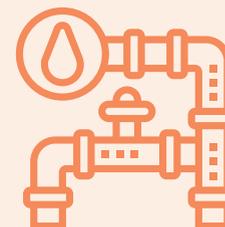
2



PENINGKATAN SINERGI PEMANFAATAN RUANG DAN WILAYAH.

4

3



PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DASAR, DAYA SAING SERTA KEMANDIRIAN DAERAH.

INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS

Indikator	Target
A. Pengembangan Kawasan Strategis	
1. Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah (per pulau/provinsi)	>1
B. Pengembangan Kawasan Perkotaan	
1. Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa	3 wilayah metropolitan
2. Pembangunan wilayah metropolitan di luar Jawa	4 wilayah metropolitan
3. Pindahan Ibukota Negara	1
4. Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota)	54 kota
5. Pembangunan kota baru	4 kota baru
C. Pemenuhan Pelayanan Dasar	
1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak	52,78% (2024)
D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan	
1. Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri	Mandiri: 8,559 (naik 3,000) Berkembang: 58,879 (naik 7,000) Tertinggal: 6,232
2. Penurunan angka kemiskinan desa (%)	9%
3. Penetapan batas administrasi desa/kelurahan	10%
4. Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara (lokasi)	187
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (lokasi)	18
6. Daerah tertinggal yang terentaskan termasuk daerah tertinggal dengan karakteristik wilayah tertentu (kabupaten)	35 (terentaskan 29)
7. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persentase)	22.5 – 23%
8. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	62 – 62.5

Indikator	Target
9. Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten	50
10. Kawasan transmigrasi yang dibangun pemukimannya dan dikembangkan pusat pertumbuhannya (kawasan)	43 tahap berkembang 13 tahap mandiri 7 tahap bersaing
E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah	
1. Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan redistribusinya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran	542
2. Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM bidang pelayanan dasar	542
3. Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	50%
4. Jumlah daerah yang melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	542
5. Jumlah daerah yang menetapkan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berbasis elektronik melalui aplikasi e-budgeting dan e-budgeting plus	542
6. Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	44****
7. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	100%
8. Jumlah Lembar Peta Dasar RBI skala 1:5,000	125,810 NLP (seluruh wilayah Indonesia non hutan)
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)	5 Rancangan Perpres
10. RDTR Perbatasan Negara	12 Rancangan Perpres
11. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	172 Kab/kota
12. Luas bidang tanah bersertifikat yang terdigiataasi dan berkualitas baik	52.72 juta Ha
13. Jumlah Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	34 Kantor Wilayah ATR/BPN dan 508 Kantor Pertanahan
14. Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKEWILAYAHAN 2020-2024

- Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera**
1. Penguatan **ketahanan bencana** pantai barat Sumatera.
 2. Pengembangan **industri pengolahan** (hilirisasi) **komoditas unggulan** (agroindustri).
 3. Pengembangan **SDM terampil** untuk mendukung kawasan industri.

- Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan**
1. Penguatan **konektivitas** wilayah.
 2. Pengembangan **industri pengolahan sumber daya alam** (hilirisasi) **perkebunan** dan hasil **tambang**.
 3. Percepatan pembangunan kawasan **perdesaan, tertinggal dan perbatasan**.

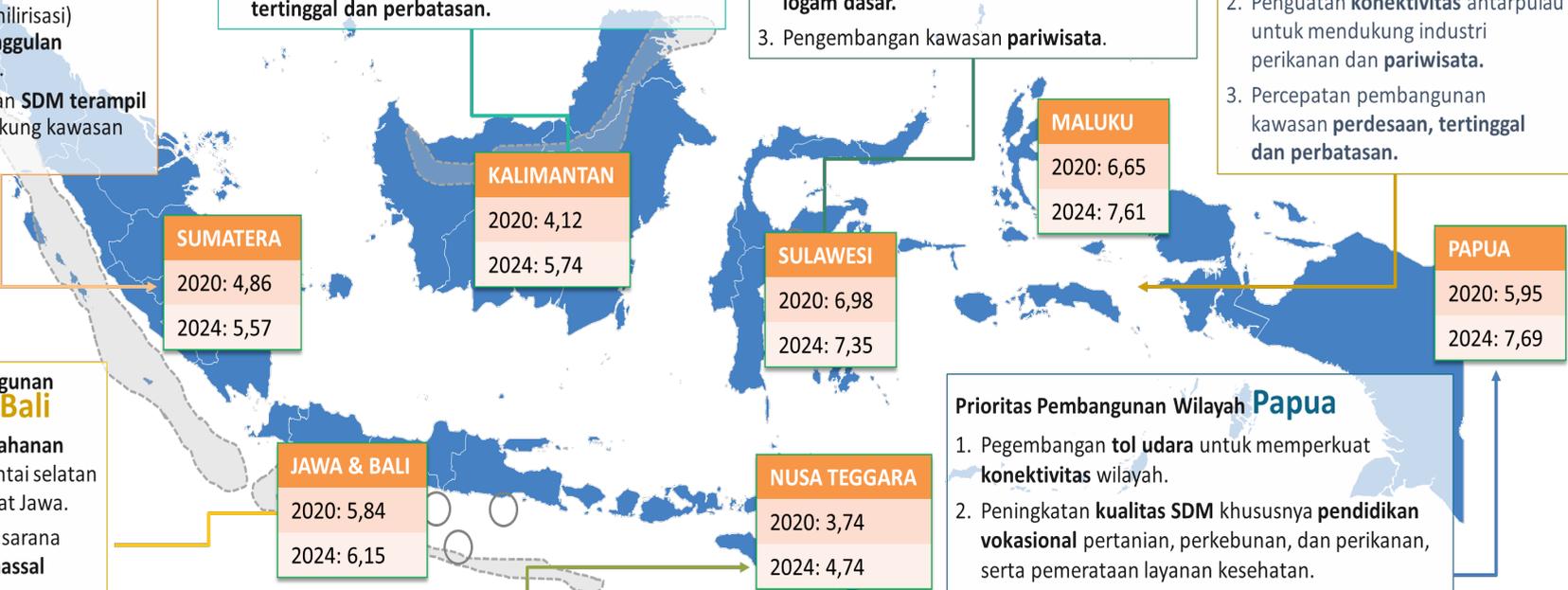
- Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi**
1. Penguatan **ketahanan bencana alam** dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah.
 2. Pengembangan **industri pengolahan** (hilirisasi) hasil **perikanan, pertanian dan logam dasar**.
 3. Pengembangan kawasan **pariwisata**.

- Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku**
1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan **industri pengolahan hasil perikanan**.
 2. Penguatan **konektivitas** antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan **pariwisata**.
 3. Percepatan pembangunan kawasan **perdesaan, tertinggal dan perbatasan**.

- Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali**
1. Penguatan **ketahanan bencana** di pantai selatan dan pantai barat Jawa.
 2. Pembangunan sarana **transportasi massal metropolitan**.
 3. Pengembangan **Bali bagian utara**.

- Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara**
1. Pengembangan kawasan **pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora**.
 2. Peningkatan **pendidikan vokasional** pariwisata, perikanan, dan peternakan.
 3. Penguatan **konektivitas antarpulau** untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan.

- Prioritas Pembangunan Wilayah Papua**
1. Pengembangan **tol udara** untuk memperkuat **konektivitas** wilayah.
 2. Peningkatan **kualitas SDM** khususnya **pendidikan vokasional** pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan.
 3. Optimalisasi **pelaksanaan otonomi khusus**: pemberdayaan masyarakat adat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antarKabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu.



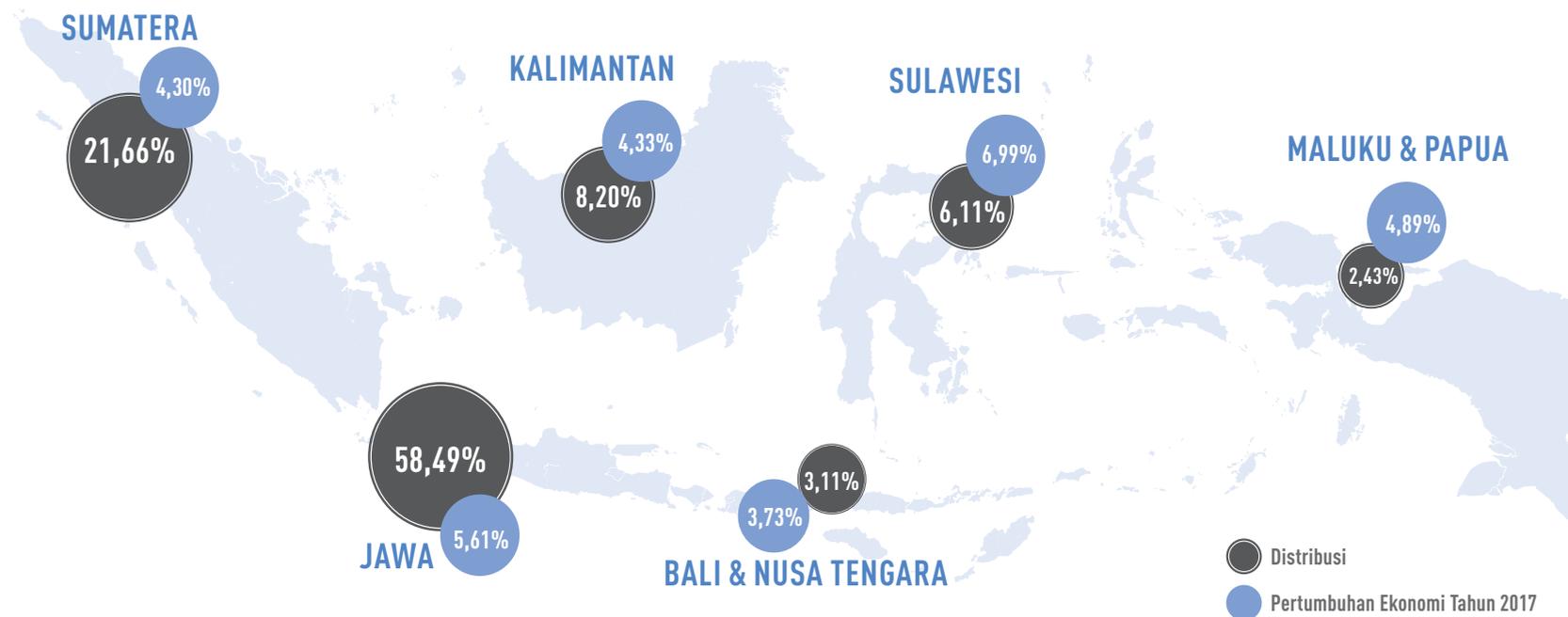
3

PENGEMBANGAN WILAYAH

- Ibu Kota Negara (IKN)
- Pengembangan Kawasan Prioritas
 - Transformasi Struktural (Pariwisata, Industri, Pertanian, dan Industri Kreatif)
 - Infrastruktur Ekonomi
 - Investasi dan Reformasi Birokrasi
- Pengembangan Pelayanan Dasar
- Development Constraint

IBU KOTA NEGARA (IKN) SEBAGAI PEMICU PEMERATAAN WILAYAH

Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah mindset Java Centris



KEUNGGULAN:

- Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa
- Memberikan equal akses bagi seluruh wilayah NKRI
- Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah, Contoh: Brasillia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypidyaw (Myanmar); Astana (Kazakhstan);
- Merubah mind-set orientasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris
- Ketersediaan lahan luas, dapat Membangun Ibu Kota, dg konsep 60% wlayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota.

KELEMAHAN:

- Membutuhkan biaya yang cukup besar
- Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN Pusat akan tetap di Jakarta

DAMPAK JANGKA PENDEK DARI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



1. Meningkatkan Investasi

Dalam jangka pendek, investasi infrastruktur untuk pembangunan ibu kota baru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya

INVESTASI RIIL PUN AKAN MENINGKAT:



47,7%

Peningkatan investasi riil di Kalimantan Timur



34,5%

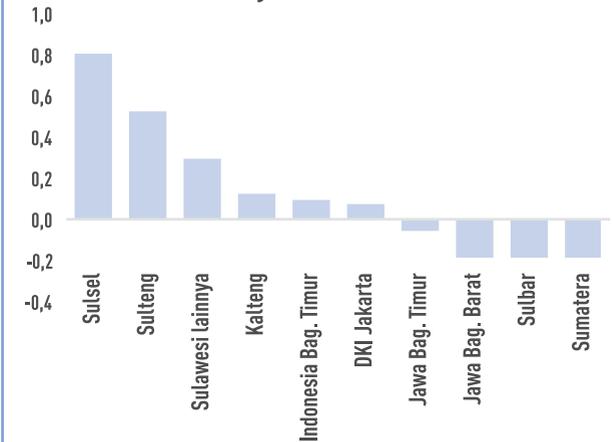
Peningkatan investasi riil di Pulau Kalimantan



4,7% Peningkatan investasi riil di Indonesia

Investasi di Kalimantan Timur akan **mendorong investasi di provinsi sekitar** Kalimantan Timur, yang antara lain:

Peningkatan Investasi di Wilayah Indonesia Lainnya (Selain Kalimantan)



DKI Jakarta akan tetap mengalami peningkatan investasi, supporting terhadap pembangunan ibu kota baru

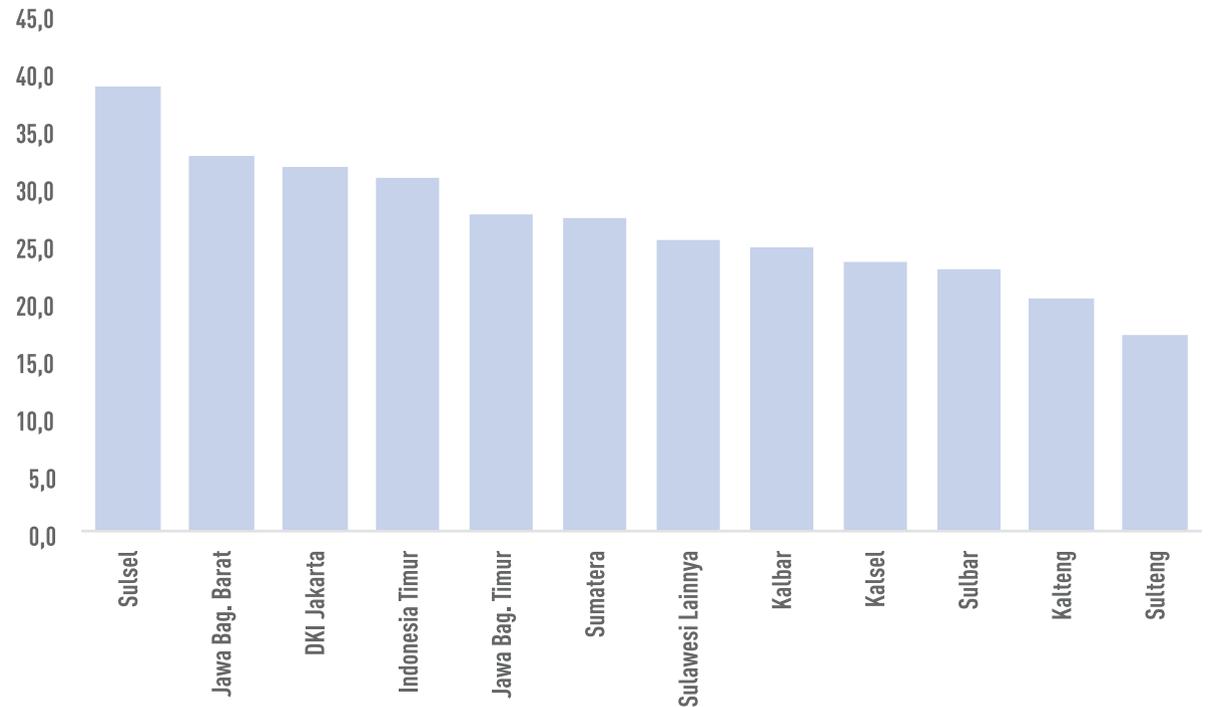
Sumber: perhitungan Bappenas



2. Meningkatkan Perdagangan Antarwilayah

Proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan suplai material dan barang ke provinsi Kalimantan Timur, yang mengakibatkan **peningkatan perdagangan dari Provinsi lain ke Kalimantan Timur**

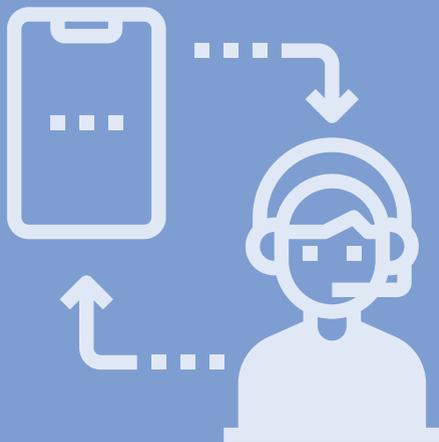
Peningkatan Perdagangan ke Prov. Kalimantan Timur



DKI akan tetap menjadi supplier utama ke Provinsi Kaltim, ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Sumber: perhitungan Bappenas

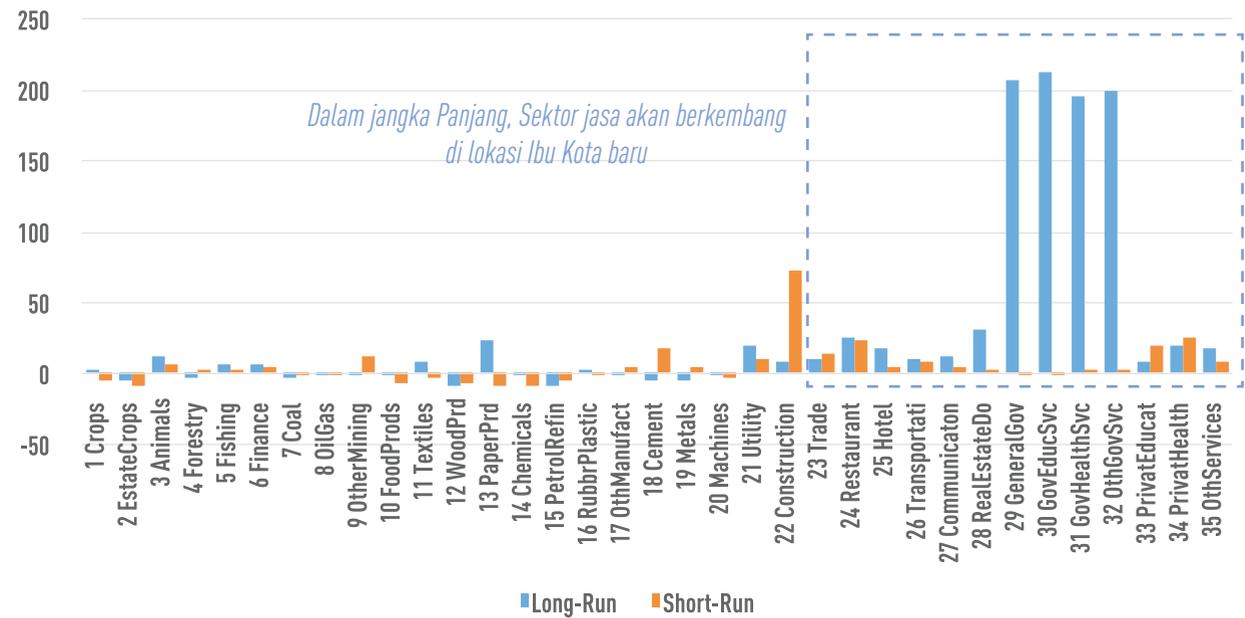
DAMPAK JANGKA PANJANG DARI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



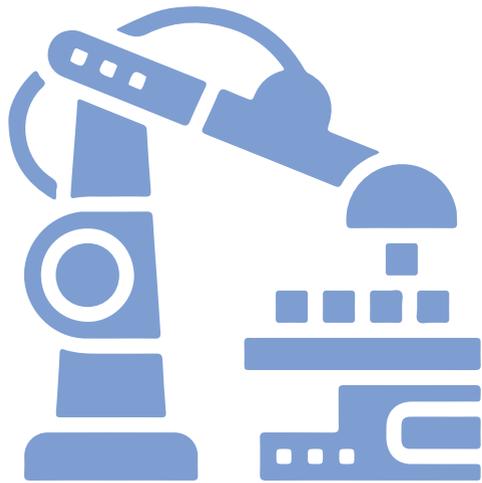
1. Peningkatan Sektor Non-Tradisional

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan meningkatkan *output* beberapa sektor non-tradisional, terutama Sektor Jasa

Peningkatan Output Sektor di Kalimantan Timur
(Jangka Pendek vs Jangka Panjang)



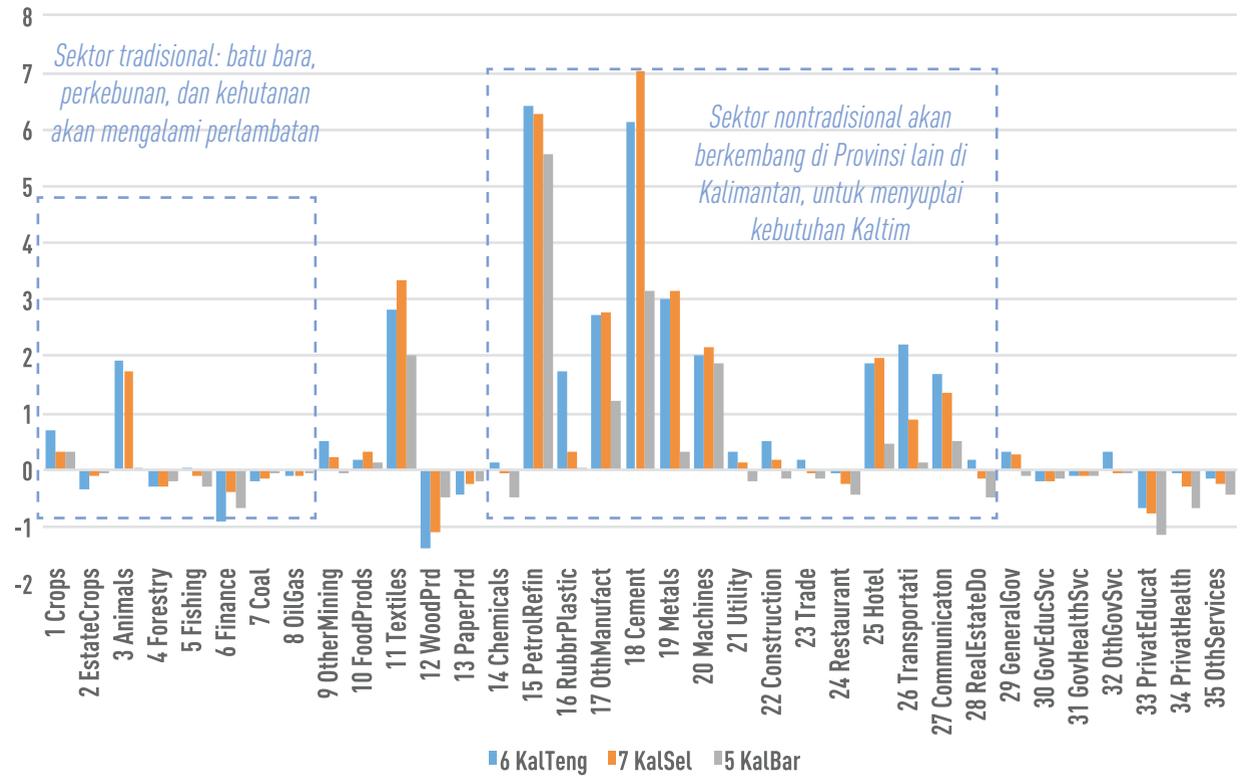
Sumber: perhitungan Bappenas



2. Diversifikasi Ekonomi

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, di Provinsi lain di Kalimantan

Pertumbuhan Output Sektor di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat



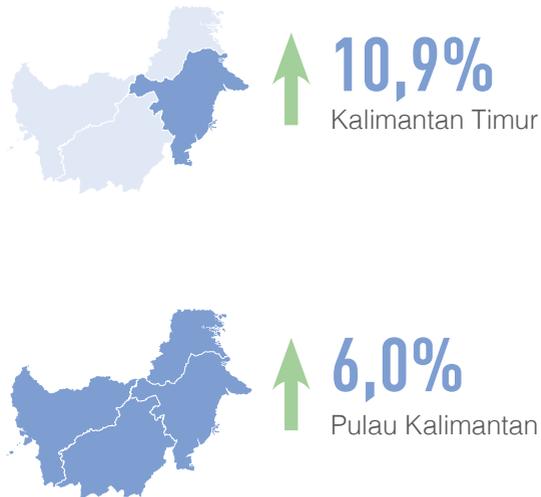
Sumber: perhitungan Bappenas

DAMPAK JANGKA PANJANG DARI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA



3. Penurunan Ketimpangan Pendapatan

PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

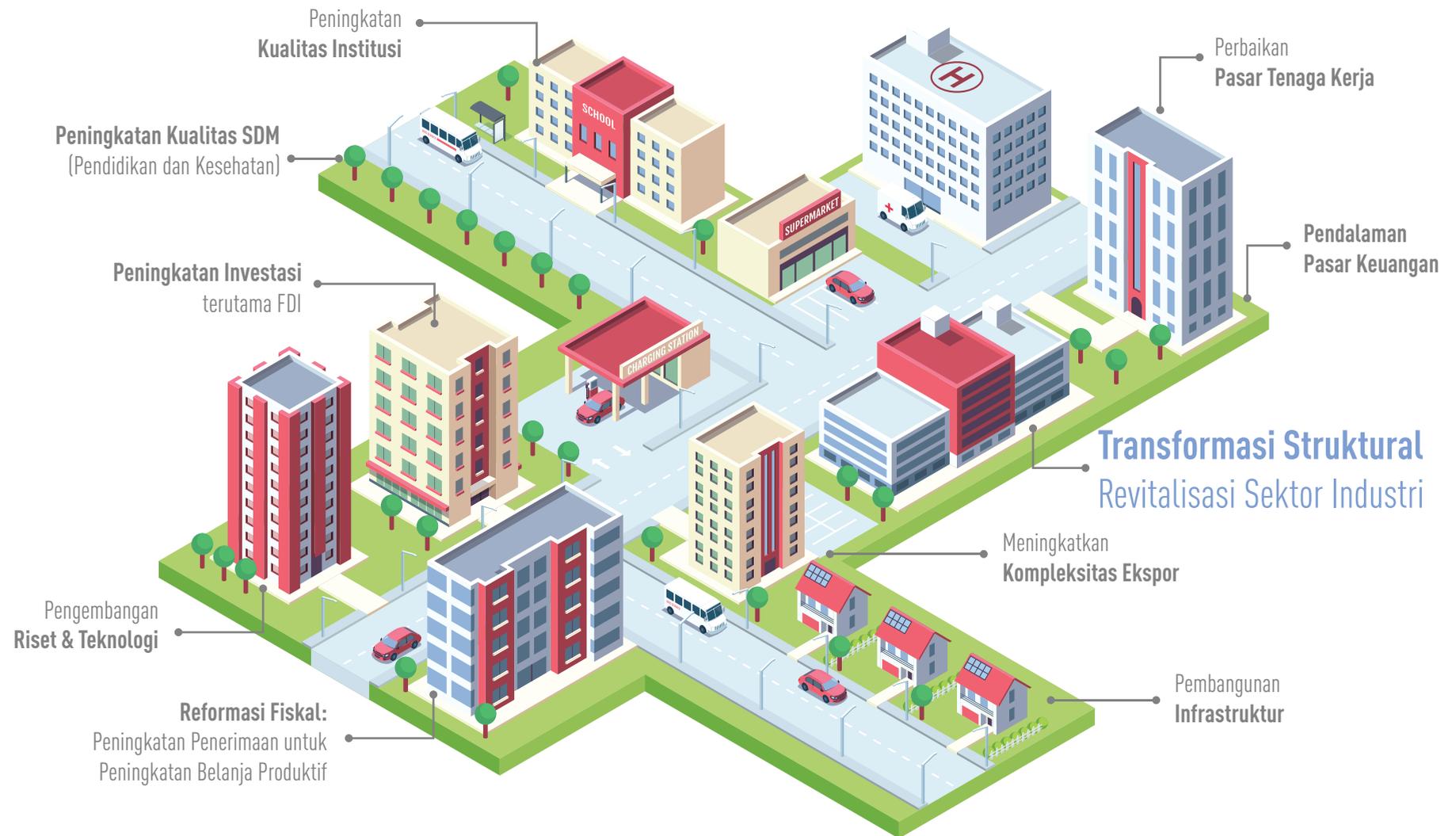


PENINGKATAN FACTOR INCOME



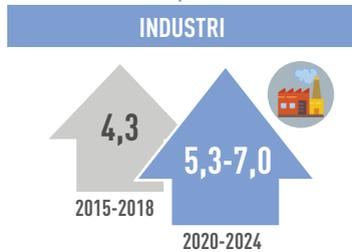
PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS: TRANSFORMASI STRUKTURAL

Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia



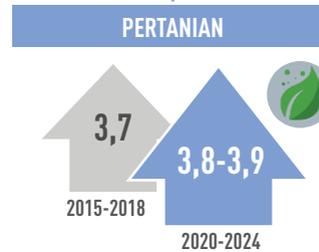
TRANSFORMASI STRUKTURAL MENJADI KUNCI

REVITALISASI INDUSTRI



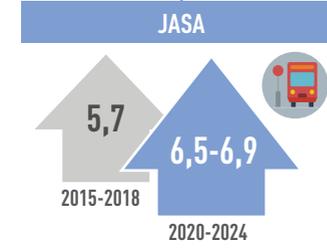
Memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan Industri 4.0

MODERNISASI PERTANIAN



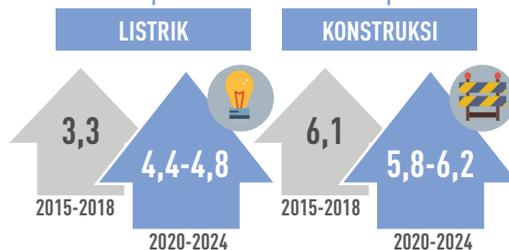
Meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan

TRANSFORMASI SEKTOR JASA



Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif

HILIRISASI PERTAMBANGAN



Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir

Keterangan:
Rata-rata pertumbuhan (Persen)



Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, maka perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

INVESTASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Arah Kebijakan : Pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendukung capaian SDGs

Strategi : Fasilitasi perlindungan, liberalisasi investasi, dan promosi investasi



TARGET TINGKAT INVESTASI

7,3-8,0%
(2020-2024)

Memberikan fasilitas kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur



6 ICOR 2024 - skenario tinggi

50 Stok Infrastruktur 2024 (Persen PDB) – skenario sedang

1,7-2,3 Belanja Modal Pemerintah 2020-2024 (Rata-rata, Persen PDB)

8,3-10,2 Pertumbuhan Capex BUMN 2020-2024 (Rata-rata, Persen)

15,4-16,6 Share PMA/PMDN 2024thd Investasi (Persen)

IDR1500T Realisasi PMA dan PMDN di tahun 2024

35 Peringkat kemudahan berusaha (ranking EODB) di tahun 2024

55% Kontribusi sektor manufaktur terhadap total realisasi investasi di tahun 2024

PENGEMBANGAN PELAYANAN DASAR



1. Sumber Daya Manusia



KESEHATAN

Rekomendasi Kebijakan:

- Percepatan perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan.
- Peningkatan kinerja sistem kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan.
- Mendorong perilaku hidup sehat didukung dengan perbaikan lingkungan dan infrastruktur.



PENDIDIKAN

Rekomendasi Kebijakan:

- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penekanan pada *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) dan kemampuan literasi.
- Peningkatan kompetensi guru melalui penguatan *pre-service education* bagi calon guru dan *in-service training* bagi guru dalam jabatan.
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Pembukaan investasi asing untuk pendidikan tinggi pada bidang yang dibutuhkan Indonesia
- Pengembangan riset inovasi dan ekosistem inovasi.
- Pengembangan sistem insentif bagi diaspora untuk kembali ke Indonesia

TARGET PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DI 2024

183 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

16 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

19% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)

14,16 Harapan Lama Sekolah (Tahun)

52,1% Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas

2,8JUTA Jumlah lulusan pelatihan vokasi

80% Persentase lulusan PT yang langsung bekerja

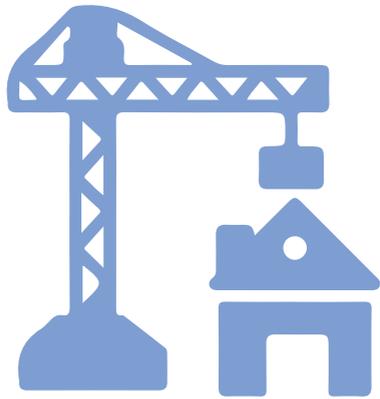
36.500 Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional

81,75 Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)

A. 84,46% Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B

B. 81,33% (Persen):

C. 80,86% a). SD/MI
b). SMP/MTs
c). SMA/MA



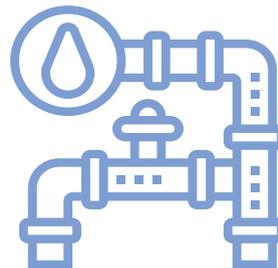
2. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah.



INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (52,78%) serta memiliki akses terhadap air minum yang layak (75,34%)
- Rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dan aman (air limbah) (90%)
- Peningkatan air baku domestik dan industri (90 m3/detik)
- Meningkatkan water use efficiency (5,3 USD/ m3)
- Pembangunan 58 unit bendungan multiguna
- Pembangunan 500.000 ha jaringan irigasi baru
- Sambungan rumah tangga (SR) dengan akses air minum layak perpipaan (24,45 Juta)



Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain :



Penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi



Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan



Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman



Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman



pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara)



Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi



Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

DEVELOPMENT CONSTRAINTS



Lingkungan

Keterbatasan Daya Dukung dan Daya Serap Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi

TARGET DAN SASARAN KEBIJAKAN



Tutupan Hutan dan Lahan Gambut serta Habitat Spesies Kunci

- Mempertahankan tutupan hutan primer pada luas minimal **43 juta Ha**.
- Memperluas area restorasi lahan gambut seluas **1,5-2 juta Ha**.



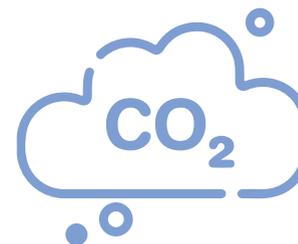
Perubahan Iklim dan Bencana

- Mempertahankan **area pesisir** yang berpotensi terkena dampak abrasi.
- Prioritas **kawasan lindung** dan **kawasan rawan bencana** dalam RTRW.



Ketersediaan Air dan Energi

- Mempertahankan ketersediaan air pada setiap pulau minimal **1000m³/kapita/tahun**.
- Meningkatkan proporsi energi baru terbarukan (EBT) minimal **20%**.
- Peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru.



Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi GRK

- Mempertahankan gas emisi di bawah **261,1 ton CO₂/milyar Rp**.



Pemanfaatan APBN

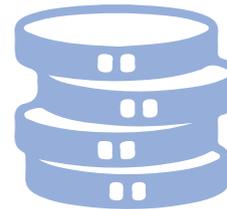
Kapasitas Fiskal dan Pendanaan
Pembangunan

TARGET DAN SASARAN KEBIJAKAN



Memperkuat kualitas alokasi pada Prioritas

- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya **Major Project**.



Memperluas Sumber-Sumber Pendanaan

- Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA), *Blended Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah
- Memperluas sumber **innovative financing** lainnya



Mengoptimalkan Pemanfaatan Pendanaan

- Integrasi pendanaan pembangunan antara pemerintah dengan daerah maupun dengan K/L terkait
- Skema pemanfaatan dengan mengikuti prinsip **money follow program**.



Memperkuat Evaluasi dan Pengendalian

- Evaluasi berupa evaluasi kebijakan strategis, evaluasi pengukuran kinerja, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- Pengendalian kinerja disertai dengan tindakan korektif

4

PRASYARAT PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
- Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
- Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter

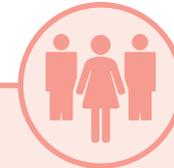
SASARAN, TARGET, DAN INDIKATOR



1

Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.

Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2016 sebesar 0,59% dan terus meningkat pada tahun 2024. Serta Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 53,74 dan terus meningkat pada tahun 2024.



2

Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2018 sebesar 70,90 dan terus meningkat pada tahun 2024.



3

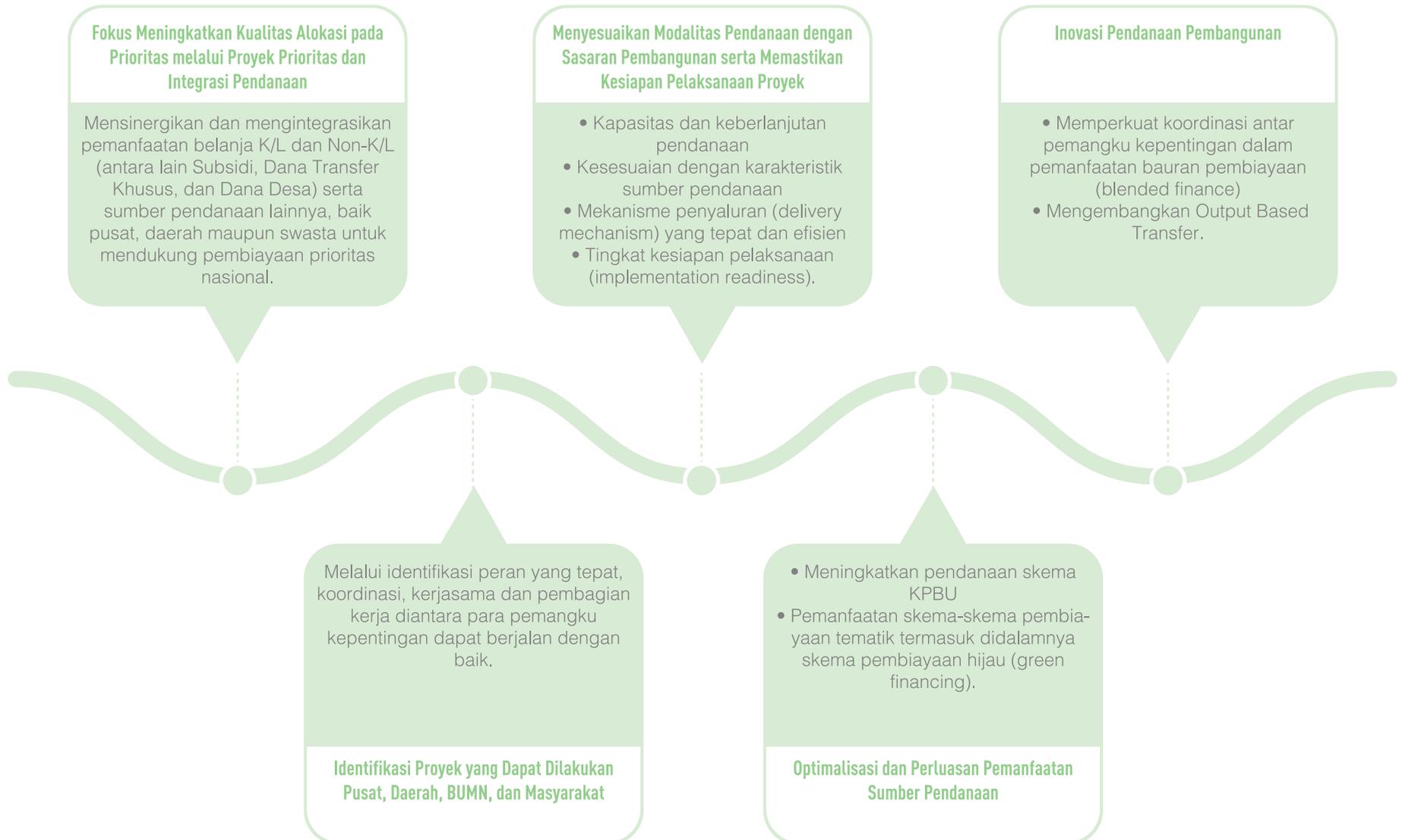
Meningkatnya ketahanan dan kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada 2024 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024

5

KERANGKA PENDANAAN DAN REGULASI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi Money Follows Program dengan 3 strategi utama:

01



MEMPERKUAT KUALITAS ALOKASI PADA PRIORITAS

- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya **Major Project**

02



MEMPERBESAR KAPASITAS PENDANAAN

- Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
- Mendorong peran BUMN, KPBU, dan Masyarakat
- Mendorong inovasi skema pendanaan (creative financing) antara lain PINA, *Blended Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah

03



MEMPERKUAT DELIVERY MECHANISM

- Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan *Major Project* sebagai alat kendali

KERANGKA DASAR PENDANAAN PEMERINTAH – BUMN – DUNIA USAHA

PEMERINTAH



APBN & APBD
(termasuk a.l. PHLN, PHDN)

Diarahkan utamanya pada:

- Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam).
- Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal.

BUMN



Penugasan kepada BUMN

- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

MASYARAKAT/ BADAN USAHA



Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPSU)
Pembiayaan Investasi Non Anggaran
Pemerintah (PIN)

Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan ekonomi.

PERLUNYA BERBAGI PERAN PEMERINTAH – BUMN – MASYARAKAT

Mendorong **keterlibatan** lebih besar dari **Non-Pemerintah** (BUMN, masyarakat dan KPBU), sementara **Pemerintah fokus** pada **pelayanan dasar** dan fungsi stabilitas nasional



PERBANDINGAN PENDANAAN DI BEBERAPA SEKTOR INDONESIA DAN NEGARA BENCHMARK

% total pendanaan per sektor

SEKTOR	PEMERINTAH		BUMN		SWASTA		PEMERINTAH-SWASTA	
	Indonesia	Benchmark	Indonesia	Benchmark	Indonesia	Benchmark	Indonesia	Benchmark
BANDARA	81%	54%	4%	NA	0%	32%	14%	14%
PELABUHAN	60%	30%	8%	NA	1%	30%	31%	39%
PERUMAHAN	2%	7%	0%	NA	93%	10%	5%	83%
AIR DAN SANITASI	61%	60%	0%	NA	7%	30%	32%	10%

Benchmark diambil untuk proyek-proyek yang dimulai antara 2015-2019 di Cina, India, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, dan Vietnam

SUMBER: Dit. Alokasi & McKinsey, Team Analysis

MENDORONG KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)

- Merupakan Pengelolaan Aset Melalui Koneksi Dengan Badan Usaha (Bukan Privatisasi)
- Diusulkan Oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dan BUMN
- Proses KPBU Dilaksanakan Rata-rata 1-3 Tahun. Bappenas Mendampingi Dan Membantu Proses Persiapan (Sekretaris Kantor Bersama)
- Bentuk KPBU :
 1. Pembayaran Oleh Pengguna Dalam Bentuk Tarif (*User Charge*)
 2. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)
 3. Bentuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

CAKUPAN PROYEK KPBU

19 SEKTOR INFRASTRUKTUR KPBU:



KONEKTIVITAS

- Transportasi
- Jalan
- Ketenagalistrikan
- Migas dan EBT
- Konservasi Energi
- Telekomunikasi dan informatika



FASILITAS PERKOTAAN

- Air Minum
- Pengelolaan Limbah Setempat
- Pengelolaan Limbah Terpusat
- Pengelolaan Sampah
- SDA & Irigasi
- Fasilitas Perkotaan
- Perumahan Rakyat



FASILITAS SOSIAL

- Pariwisata
- Fasilitas Pendidikan
- Lembaga Permasyarakatan
- Sarana Olah Raga, Kesenian dan Budaya
- Kawasan
- Kesehatan

BEBERAPA CONTOH PROYEK KPBU

KONEKTIVITAS

- Jalan Non-Tol Riau
- LRT Medan
- Pelabuhan Bau-Bau
- Palapa Ring Barat, Timur, dan Tengah

SDM

- SPAM Umbulan
- Rumah Sakit Umum Sidoarjo
- Ekspansi LAPAS Nusakambangan

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR NON ANGGARAN PEMERINTAH (PINA)

- PINA merupakan skema fasilitasi yang bertujuan untuk mempercepat financial closed proyek-proyek infrastruktur
- PINA telah berhasil memfasilitasi USD 3,3 miliar untuk 11 proyek lintas sektor pada akhir 2018



KATEGORI	SEKTOR						
Connectivity	 Toll Road	 Seaports	 Airports	 Railways			
Energy and Electricity	 Power Plant	 Power Transmission	 Oil and Gas	 Coal	 Mining		
Strategic Industry and Plantations	 Manufacturing Industry	 Defence	 Aerospace	 IT Industry	 Integrated Tourism	 Plantations	 Smelter
Energy and Electricity	 Affordable Housing		 Urban Housing				

BEBERAPA CONTOH POTENSI PROYEK PINA

- Probolinggo – Banyuwangi Toll Road
- BIJB Kertajati and Aerocity Development
- North Kalimantan Hydropower 1,375 MW
- Nipa Island Oil Storage
- Satelit multifungsi (149 ribu point) di daerah terpencil

KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2020-2024

Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Ditujukan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional



NO.	AGENDA PRORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA REGULASI (TINGKAT UU)	KERANGKA KELEMBAGAAN
1	Manusia	12	3
2	Ekonomi	11	6
3	Kewilayahan	5	2
4	Infrastruktur	1	1
5	Politik, Hukum, dan Pertahanan	20	5
TOTAL		49	17



6

MAJOR PROJECT



EKONOMI

1. Penerapan Industri 4.0
2. Penyelesaian Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Wakatobi
3. Penguatan Jaminan Usaha dan Korporasi Petani dan Nelayan
4. Akselerasi Energi Terbarukan dan bahan bakar nabati berbasis komunitas
5. Industrialisasi dan Hilirisasi Produk Sumber Daya Alam di luar Pulau Jawa

KEWILAYAHAN

1. Integrasi pembangunan wilayah Batam-Bintan
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar)
3. Pengembangan Kota Baru (Sofifi, Tanjung Selor, Maja, dan Sorong)
4. Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal di Pulau Papua: Wilayah Adat Laa Pago di Provinsi Papua dan Wilayah Adat Domberay di Provinsi Papua Barat
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana: Pulau Lombok dan Sekitarnya, Kota Palu dan Sekitarnya, dan Kawasan Pesisir Selat Sunda
6. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara: PKSN Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PKSN Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu di Provinsi NTT, PKSN Jayapura dan PKSN Merauke di Provinsi Papua
7. Pemindahan Ibu Kota Negara

SDM

1. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
2. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
3. Pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix di 4 major Universitas)
4. Digitalisasi dan Integrasi Bantuan Sosial

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1. -

INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Tol Trans Sumatera
2. Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa Terintegrasi dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak
3. Pembangunan KA Cepat (Jakarta – Surabaya/ Jakarta – Bandung)
4. Pembangunan KA Angkutan Barang (KA Sulawesi, Makassar-Pare Pare)
5. Pembangunan Jembatan Udara Papua
6. Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
7. Pembangunan Jalan Trans Papua
8. Pembangunan Jalan Trans/lingkar Pulau terluar/tertinggal (Nias, Morotai, Sumba, Dan Saumlaki)
9. Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Terpadu
10. Pengembangan Infrastruktur Gas Kota

11. Peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman
12. Penyediaan 100.000 unit hunian layak
13. Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (Pembangunan Akses Minum Perpipaan)
14. Perluasan distribusi air bersih di seluruh wilayah
15. Pengelolaan Citarum Harum
16. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Kota Metropolitan
17. Proyek Revitalisasi kilang minyak (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai) dan pembangunan 2 kilang baru (Tuban dan Bontang)
18. Transformasi Digital
19. Penyelesaian 35000 MW [Proyek Peningkatan Pembangkit Listrik PLTA Pumped Storage (Sustainability & Security); Proyek Penerapan “SPM” Penyediaan Akses Listrik (Access); Proyek Interkoneksi Keandalan Sistem (Security)]

LH, KETAHANAN BENCANA, DAN PI

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana Terpadu
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Medis, Limbah B3, Sampah Domestik, dan Sampah Plastik

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

1. Penguatan keamanan siber